

**ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENDAPATAN DOMESTIK REGIONAL
BRUTO DI INDONESIA**

Sintong Arfiyansyah¹, Moh. Khusaini²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Email: Sintong.arfiyan@gmail.com

ABSTRACT

Salah satu tolak ukur dalam pembangunan ekonomi adalah melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM tidak hanya melihat aspek ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi (PDRB), tetapi juga melihat manusia dalam aspek sosial yaitu pendidikan dan kesehatan. Ironisnya, meskipun pertumbuhan ekonomi di Indonesia cukup tinggi tetapi peringkat IPM Indonesia masih rendah. Untuk itu dibutuhkan peran pemerintah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi di Indonesia. Peran tersebut adalah melalui kebijakan pengeluaran pemerintah yang dapat dibedakan menjadi berbagai fungsi diantaranya adalah ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah di ketiga fungsi tersebut terhadap IPM melalui PDRB di Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder dari tahun 2010-2015 dan mengambil obyek penelitian di lima belas provinsi dengan kategori IPM tinggi, sedang dan rendah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis jalur. Hasil penelitian ini menyatakan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan pengeluaran fungsi ekonomi, pendidikan dan kesehatan terhadap IPM. Ketiga fungsi tersebut mempengaruhi IPM dengan jalur yang berbeda di mana fungsi ekonomi dan pendidikan berpengaruh melalui variabel PDRB, serta fungsi kesehatan mempengaruhi secara langsung tanpa melalui PDRB. Provinsi dengan IPM rendah berdasarkan penelitian sangat tergantung terhadap pengeluaran fungsi kesehatan meskipun pengeluaran fungsi tersebut bukan prioritas bagi provinsi tersebut.

Kata Kunci: IPM, Pengeluaran Pemerintah, Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan.

A. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi yang stabil dan meningkat adalah tujuan utama suatu negara. Dalam negara berkembang seperti Indonesia, peran pemerintah sangat sentral dalam meningkatkan pembangunan ekonomi tersebut dan menjaga keberlanjutan dari pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu tolak ukur dalam pembangunan ekonomi yang baik adalah dengan melihat keberhasilan suatu negara terhadap peningkatan modal manusia. Modal manusia adalah hal yang penting dalam melihat pembangunan ekonomi karena modal manusia tidak hanya melihat aspek ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita, tetapi juga melihat manusia dalam aspek sosial yang diantaranya membutuhkan kehidupan layak melalui pendidikan dan kesehatan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah salah satu alat ukur yang terbaik dalam melihat keberhasilan pembangunan dan peningkatan kualitas modal manusia tersebut. Meskipun tidak mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia karena dimensinya sangat luas, namun IPM dinilai mampu mengukur dimensi dari pembangunan manusia melalui tiga indikator utama yaitu kehidupan yang layak, pendidikan dan kesehatan.

Indonesia mempunyai nilai yang kurang memuaskan terkait peringkat IPM di dunia. Berdasarkan klasifikasi UNDP (*United Nation Development Program*), Indonesia masuk sebagai negara dengan kategori Nilai Pembangunan Menengah dan menempati peringkat 113 di dunia pada tahun 2015. Hal ini tentu cukup mengkhawatirkan karena Indonesia adalah salah satu negara dengan penduduk terbesar di dunia dan menjadi bagian dari *G20* atau 20 (dua puluh) negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Indonesia berada di peringkat lima regional Asia Tenggara dan mempunyai nilai Indeks sebesar 0,689 di bawah negara Asia Tenggara lainnya seperti Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia dan Thailand. Peringkat Indonesia yang berada di tengah ini adalah sebuah ironi dan harus menjadi perhatian oleh pemerintah. Oleh sebab itu dibutuhkan kontribusi pemerintah baik itu Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk

meningkatkan modal manusia yang kompetitif dan mampu menjadi negara dengan kategori IPM dengan level yang lebih baik sekaligus meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah daerah menjadi sosok strategis terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Melalui berbagai macam kebijakan salah satunya adalah pengeluaran pemerintah, Pemerintah daerah diharapkan mampu memberikan stimulus positif terhadap meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kemudian dalam kepentingan peningkatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pengeluaran pemerintah juga diharapkan mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Beberapa ekonom terutama kelompok Keynesian berpendapat bahwa pengeluaran pemerintah dapat merangsang permintaan agregat di dalam perekonomian dan pada akhirnya memberikan rangsangan terhadap perputaran ekonomi di daerah yang melibatkan sektor publik dan sektor privat. Pengeluaran pemerintah yang ditunjukkan pada fungsi tertentu dapat menciptakan multiplier ekonomi melalui agregat permintaan yang ditimbulkan. Oleh sebab itu dibutuhkan kontribusi pemerintah, khususnya alokasi pengeluaran pemerintah dalam bentuk belanja menurut fungsinya.

Klasifikasi pengeluaran Pemerintah dalam bentuk belanja menurut fungsi terdiri dari 9 (Sembilan) fungsi yaitu antara lain pelayanan umum, ketertiban dan ketentraman, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan dan perlindungan sosial (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di dalam pasal 33). Di antara 9 (sembilan) fungsi tersebut, tanpa mengesampingkan fungsi yang lain, terdapat tiga fungsi yang perlu diteliti terlebih dalam terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yaitu fungsi ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

Aspek ekonomi, pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar di suatu wilayah. Untuk mendukung aspek tersebut dibutuhkan sebuah alokasi anggaran yang tepat yang terangkum dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) dalam suatu daerah. Alokasi anggaran yang tepat terhadap fungsi pengeluaran Pemerintah dalam ke tiga fungsi tersebut diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari PDRB perkapita serta modal manusia yang tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia.

Beberapa penelitian yang mendasari ini adalah, *pertama* Prasetyo dan Zuhi (2013) menemukan bahwa ada beberapa pengeluaran pemerintahan negara dengan pengaruh yang cukup terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan diantaranya hanya Singapura dan Zambia yang mampu memberikan pengaruh dan perbaikan positif dalam Indeks Pembangunan Manusia. *Kedua*, menurut Landau (1997) tidak ada pengaruh yang signifikan pengeluaran pemerintah berupa kesehatan dan pendidikan terhadap modal manusia di contoh negara berkembang yang non komunis. Hal ini mengindikasikan bahwa pengeluaran pemerintah di negara cenderung kapitalis kurang memberikan efek yang baik terhadap modal manusia. Kemudian *Ketiga*, menurut Laisina et al (2015) sektor pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM sedangkan sektor Kesehatan memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan di Sulawesi Utara selama kurun waktu 2002-2013. IPM sendiri mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap PDRB di provinsi ini. *Keempat*, Agustina et al (2016) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB tetapi tidak signifikan terhadap IPM. Sedangkan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan positif dan signifikan terhadap PDRB tetapi negatif dan tidak signifikan terhadap IPM. *Kelima*, Kahang et al (2016) menyatakan bahwa sektor pengeluaran kesehatan tidak signifikan mempengaruhi IPM dan pengeluaran pendidikan cukup signifikan dalam mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Kutai Timur.

Berangkat dari permasalahan tersebut dan beberapa hasil penelitian yang cenderung tidak seragam, penulis tertarik untuk membuat penelitian. Penelitian ini melihat bagaimana menganalisis pengaruh alokasi belanja pemerintah yang diprosikan oleh fungsi ekonomi, pendidikan dan kesehatan, terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Pendapatan Domestik Regional Bruto perkapita di Indonesia. Peneliti mengambil sampel sebanyak 15 (lima belas) provinsi di Indonesia dengan pembagian berdasarkan variasi IPM tinggi hingga rendah. Indonesia adalah salah satu negara dengan PDRB terbesar di dunia tetapi memiliki HDI atau IPM yang cenderung rendah sehingga hal ini tentu harus menjadi perhatian utama bagi pemerintah untuk terus bersaing menjadi negara maju dan meningkatkan pembangunan.

B. KAJIAN PUSTAKA

Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah sesuai dengan tujuan kebijakan pemerintah dalam menjalankan perekonomian. Pengeluaran Pemerintah tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Daerah (APBD). Menurut Boediono (2012) pengeluaran pemerintah dapat digolongkan lagi menjadi 3 (tiga) kelompok besar yaitu, pengeluaran pemerintah untuk belanja barang dan jasa, pengeluaran pemerintah untuk pembayaran gaji pegawai, dan pengeluaran pemerintah untuk pembayaran transfer payment. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan diperbaharui oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011, Klasifikasi Belanja Pemerintah menurut fungsinya dibagi menjadi 9 (Sembilan) fungsi yaitu fungsi pelayanan umum, ketertiban dan ketentraman, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan dan perlindungan sosial. Kesembilan fungsi tersebut dikelompokkan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara.

Peran pemerintah dalam sistem ekonomi dalam suatu negara menjadi perdebatan yang terus menerus dan tidak menemui titik kesepakatan. Kaum kapitalis yang dipimpin oleh bapak ekonom klasik yaitu Adam Smith menyatakan bahwa peran pemerintah dalam sistem ekonomi harus diminimalisir. Para ekonom aliran klasik menganggap bahwa ekonomi akan mencapai keseimbangan tanpa campur tangan pemerintah dan akan terus mengalami perkembangan yang pesat. Ekonom berpaham sosialisme menentang hal tersebut. Karl Marx muncul secara mengejutkan dalam panggung ekonomi dengan pemahannya. Karl Marx berbicara tentang aliansi yang muncul dalam paham kapitalisme dan mendorong berbagai revolusi ekonomi di seluruh dunia. Paham kapitalis kemudian di hantam keras oleh guncangan dunia dalam Depresi Besar pada tahun 1930-an. Terjadinya depresi ini menimbulkan kekhawatiran adanya kelemahan fundamental terhadap model ekonomi kapitalis dengan semakin besarnya pengangguran di dunia barat. Sehingga kemudian muncul seorang ekonom yang menyelamatkan kapitalisme. Dia adalah John Maynard Keynes. Profesor dari Cambridge University ini mencetuskan teori “ekonomi baru” dimana di tuntut adanya intervensi pemerintah. Berbeda dengan ide Karl Marx dimana intervensi pemerintah bersifat mutlak, Keynes memberikan gagasan tentang intervensi pemerintah dalam area fiskal untuk menyeimbangkan ekonomi pasar bukan mengontrolnya secara penuh. Salah satu intervensi atau peran pemerintah yang digagaskan oleh Keynes adalah aspek pengeluaran pemerintah (*government Expenditure*) yang menjadi bagian dari total pendapatan nasional atau PDRB dan berfungsi sebagai kontrol kegiatan ekonomi.

Indeks Pembangunan Manusia

Pemenang Nobel bidang ekonomi tahun 1998, Amartya Sen mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh dipandang sebagai tujuan. Harus ada dimensi lain yang lebih menggambarkan tujuan utama dalam mengukur kesejahteraan masyarakat yaitu pembangunan. Dimensi pembangunan harus lebih dipertajam dalam memperhatikan kualitas hidup yang dijalani dan kebebasan individu (Todaro, 2014). Pendapatan riil tidak lagi memadai sebagai ukuran utama kesejahteraan karena dibutuhkan berbagai indikator lain yang terintegrasi seperti tingkat kesehatan dan pendidikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah salah satu tolak ukur kinerja pembangunan tersebut. IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dimensi tersebut adalah dimensi ekonomi, dimensi kesehatan dan dimensi pendidikan. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Pengukuran ini diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup.

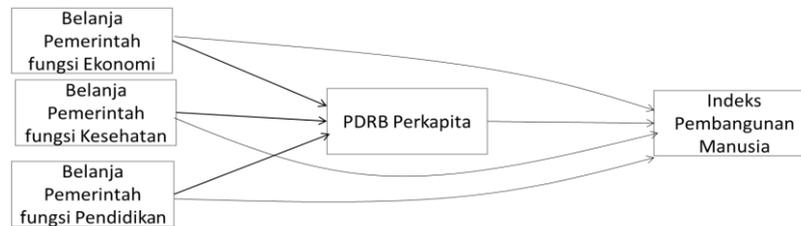
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB adalah Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan (BPS, 2016). Pada dasarnya PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Menurut BPS terdapat tiga pendekatan yang umumnya

digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu melalui pendekatan produksi, Pendekatan Pendapatan dan Pendekatan. Perhitungan Pendekatan Pengeluaran adalah perhitungan paling umum dalam mendasari konsep PDRB saat ini. Konsep perhitungan PDRB melalui Pendekatan Pengeluaran ini pertama kali dikemukakan oleh John Maynard Keynes dalam buku *The General Theory* (Skousen, 2005). Keynes memfokuskan unsur pengeluaran sebagai unsur utama pembentuk PDRB. Beliau mengemukakan konsep perhitungan PDRB yang telah diadopsi dalam perhitungan pendapatan nasional maupun daerah di seluruh dunia.

PDRB dapat dilihat secara total maupun perkapita. PDRB perkapita adalah jumlah PDRB yang dibagi oleh total penduduk di suatu wilayah. PDRB perkapita adalah salah satu indikator ekonomi dalam menentukan dimensi Pembangunan Manusia. PDRB perkapita yang tinggi menunjukkan kualitas hidup yang lebih layak di suatu daerah karena rata-rata pendapatan penduduknya tinggi dan semakin mempunyai banyak pilihan untuk memenuhi kebutuhan hidup. PDRB perkapita adalah jembatan dalam sudut pandang ekonomi dalam melihat kualitas Pembangunan Manusia, sedangkan pendidikan dan kesehatan merupakan bagian dari konsep sosial. Integrasi kuat antara ketiga dimensi tersebut membentuk nilai Indeks Pembangunan Manusia yang dapat diukur dan menjadi modal utama dalam pembangunan dalam suatu negara.

Kerangka Konsep



Hipotesis

1. Diduga bahwa pengeluaran pemerintah sektor ekonomi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan PDRB perkapita.
2. Diduga bahwa pengeluaran pemerintah sektor kesehatan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan PDRB perkapita.
3. Diduga bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan PDRB perkapita.

C. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus dengan menggunakan metode kuantitatif. Tempat atau obyek penelitian ini adalah 15 (lima belas) provinsi di Indonesia. Waktu dalam penelitian ini adalah 6 (enam) tahun yaitu tahun 2010 hingga tahun 2015. Lima belas provinsi ini menjadi pilihan obyek penelitian mewakili berbagai kategori dalam Indeks Pembangunan Manusia Indonesia dari kategori tinggi hingga kategori rendah sehingga diharapkan dapat mewakili kondisi IPM yang sebenarnya di Indonesia.

Tabel 1. Nilai IPM Lima Belas Provinsi obyek Penelitian

Provinsi Kategori IPM tinggi	Nilai IPM	Provinsi Kategori IPM sedang	Nilai IPM	Provinsi Kategori IPM rendah	Nilai IPM
DI YOGYAKARTA	77.59	SUMATERA UTARA	69.51	MALUKU UTARA	65.91
KALIMANTAN TIMUR	74.17	JAWA TENGAH	69.49	NUSA TENGGARA BARAT	65.19
KEP. RIAU	73.75	JAWA TIMUR	68.95	NUSA TENGGARA TIMUR	62.67
SULAWESI UTARA	70.39	BENGKULU	68.59	PAPUA BARAT	61.73
BANTEN	70.27	KALIMANTAN SELATAN	68.38	PAPUA	57.25

Sumber : Data Diolah BPS, 2018

Definisi Operasional dan Ukuran Variabel Penelitian

1. Pengeluaran Pemerintah Sektor Ekonomi

Pengeluaran pemerintah sektor ekonomi adalah pengeluaran pemerintah yang dilihat melalui alokasi belanja pemerintah provinsi di sektor ekonomi dan dinyatakan dalam satuan milyaran rupiah.

2. Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan
Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan adalah pengeluaran pemerintah yang dilihat melalui alokasi belanja pemerintah provinsi di sektor kesehatan dan dinyatakan dalam satuan milyaran rupiah.
3. Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan
Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan adalah pengeluaran pemerintah yang dilihat melalui alokasi belanja pemerintah provinsi di sektor pendidikan dan dinyatakan dalam satuan milyaran rupiah.
4. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita
PDRB perkapita adalah jumlah Pendapatan Domestik Regional Bruto dalam suatu wilayah yang dibagi dengan jumlah penduduk di wilayah tersebut. Variabel ini mencerminkan rata-rata pendapatan kotor yang diterima oleh satu penduduknya. PDRB perkapita yang digunakan dalam penelitian ini merupakan PDRB perkapita provinsi atas Dasar harga berlaku dan dinyatakan dalam jutaan rupiah.
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah salah satu tolak ukur kinerja pembangunan secara keseluruhan. IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dan dinyatakan dalam bentuk nilai atau indeks.
Data yang dikumpulkan dengan penelitian ini adalah jenis data runtut waktu (time series) dengan sumber data sekunder. Menurut Indriantoro dan Soepomo (2002) data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh provinsi di Indonesia sedangkan sampel yang digunakan adalah 15 (lima belas) provinsi di Indonesia. Dalam pengambilan sampel yang mewakili populasi, teknik yang digunakan adalah *purposive sampling*. Teknik ini menurut Sugiyono (2007) merupakan teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini sampel yang di ambil adalah provinsi dengan berbagai kategori nilai IPM dari yang tinggi hingga rendah atau kurang.

Spesifikasi Model

Dalam penelitian ini model penelitian yang digunakan adalah model regresi data panel untuk menguji pengaruh pengeluaran pemerintah, yang terdiri dari pengeluaran pemerintah untuk fungsi ekonomi, kesehatan dan pendidikan pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Pendapatan Domestik Regional Bruto perkapita. Data panel adalah gabungan antara data *time-series* dan data *cross-section*.

Metode Analisis data yang digunakan adalah analisis jalur (*Path Analysis*) Model *Trimming*. Metode ini digunakan untuk menganalisis pola hubungan antar variabel dengan mengeluarkan model variabel eksogen yang koefisien jalurnya tidak signifikan (Riduan, 2017). Tujuan dari model ini adalah untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengaruh dalam jalur tersebut ditunjukkan melalui koefisien jalur pada setiap diagram jalur dari hubungan kausal antar variabel bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan kerangka konseptual, maka terdapat 2 (dua) bentuk persamaan awal yang disusun yaitu sebagai berikut:

$$(1) Y_{it} = \alpha + \beta_1 P1X1_{it} + \beta_2 P1X2_{it} + \beta_3 P1X3 + \beta_4 P1D_1 + \beta_5 P1D_2 + \varepsilon_{it},$$

$$(2) IPM_{it} = \alpha + \beta_1 P2X1_{it} + \beta_2 P2X2_{it} + \beta_3 P2X3 + \beta_4 P2Y_{it} + \beta_5 P2D_1 + \beta_6 P2D_2 + \varepsilon_{it},$$

Dimana :

- Y = Pendapatan Domestik Regional Bruto Perkapita
- X1 = Alokasi Belanja Pemerintah fungsi Ekonomi
- X2 = Alokasi Belanja Pemerintah fungsi Kesehatan
- X3 = Alokasi Belanja Pemerintah fungsi Pendidikan
- IPM = Indeks Pembangunan Manusia
- D1 = variabel *Dummy* Kategori IPM Sedang

- D2 = variabel Dummy kategori IPM Tinggi
P1 = Persamaan Pertama
P2 = Persamaan Kedua
 α = Konstanta Umum
 $\beta(1..6)$ = Koefisien regresi masing-masing variabel independen dan *dummy*
n = Banyaknya wilayah observasi (15 provinsi di Indonesia)
 ε = Variabel pengganggu

Model Persamaan tersebut bersifat awal dan merupakan model struktur hipotesis. Apabila selama pengujian model terdapat variabel yang tidak signifikan, maka variabel tersebut di keluarkan dari model struktur perbaikan yang baru dan kemudian kembali dilakukan pengujian model.

Spesifikasi Model Terbaik

Terdapat tiga macam pendekatan dalam metode analisa yang bisa digunakan dalam analisis regresi data panel, yaitu model *common effect*, *model fixed effect*, dan model *random effect*. Untuk memilih salah satu model estimasi yang dianggap paling tepat dari tiga jenis model data panel maka perlu dilakukan serangkaian uji yaitu:

1. Uji *Chow* statistik digunakan untuk menentukan metode antara pendekatan *common effect* dan *fixed effect*.
2. Uji *Hausman* digunakan untuk menentukan metode antara pendekatan *fixed effect* dan *random effect*.

Uji Asumsi Klasik

Apabila model yang terbaik adalah model *Random Effects* (RE), maka deteksi asumsi klasik tidak perlu di lakukan karena model tersebut adalah model *Feasible Generalized Least Square* (FGLS). FGLS mengasumsikan adanya kondisi heterogenitas antar persamaan dan memperhatikan adanya struktur residu yang berbeda antar persamaan, di mana setiap persamaan diasumsikan homoskedastik sehingga estimator dengan teknik ini tidak relevan lagi dengan konsep pengujian asumsi klasik (Ekananda, 2017). Sedangkan apabila model yang terbaik adalah model *Fixed Effects* (FE) atau model *Pooled Least Square* (PLS), maka pengujian model terhadap asumsi klasik dapat dilakukan. Hal ini disebabkan karena ke dua model tersebut merupakan model OLS (*Ordinary Least Square*).

Uji Kesesuaian Model Analisis Jalur Model *Trimming*

Pengujian ini dikhususkan dalam metode analisis Jalur Model *Trimming*. Uji ini dimaksudkan untuk melihat kesesuaian model perbaikan yang diusulkan memiliki kesesuaian (*fit*) dengan data atau tidak. Dalam analisis jalur untuk suatu model yang diusulkan dikatakan *fit* dengan data apabila matriks korelasi sampel tidak jauh berbeda dengan matriks korelasi estimasi atau korelasi yang diharapkan (Ridhuwan, 2017).

Pengujian Hipotesis

Pengujian dilakukan untuk menentukan baik atau buruknya model melalui uji koefisien determinasi (R^2), uji secara serempak (*F-test*), dan uji secara parsial (*t-test*) dalam menentukan diterima atau ditolaknya H_0 . *Alpha* yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1% atau 0,01.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Data

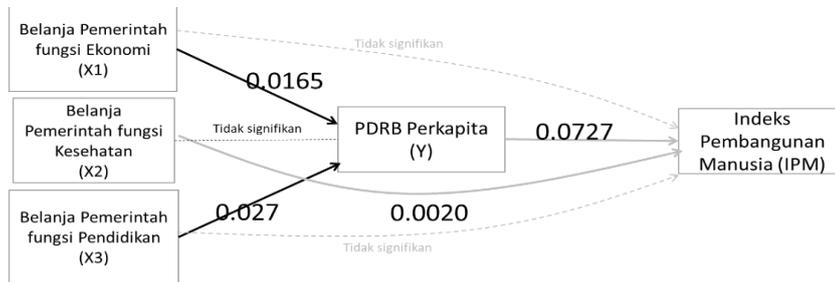
Dalam melakukan analisis data terhadap penelitian ini dibentuk dua persamaan awal yang difungsikan untuk melihat pengaruh langsung dan tidak langsung variabel bebas yaitu alokasi pengeluaran pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Kedua persamaan tersebut dapat berubah sesuai dengan hasil uji signifikansi dan kesesuaian model dalam analisis jalur menggunakan model *trimming* sehingga membentuk dua persamaan baru yang dalam penelitian ini disebut sebagai persamaan perbaikan.

Setelah melakukan perbaikan model Persamaan Pertama dan Persamaan Kedua dan telah lolos uji kesesuaian model serta uji asumsi klasik, maka terbentuklah model baru dengan koefisien sebagai berikut :

$$(1)Y_{it} = 20.78 + 0.0165 P1X1_{it} + 0.027 P1X3 - 14.39 P1D1 + 26.52 P1D2 + \varepsilon_{it}$$

$$(2)IPM_{it} = 58.34 + 0.0020 P2X2_{it} + 0.0727 P2Y_{it} + 5.16 P2D1 + 8.47 P2D2 + \varepsilon_{it}$$

Gambar 1: Struktur Model Perubahan



Sumber : Data diolah Penulis, 2018

Struktur model perbaikan mengeliminasi pengaruh tidak signifikan dalam model persamaan sehingga Belanja Pemerintah fungsi Kesehatan (X2) tidak diregresikan kepada PDRB Perkapita (Y) serta Belanja Pemerintah Fungsi Ekonomi (X1) dan Belanja Pemerintah Fungsi Pendidikan (X3) tidak diregresikan kepada Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari bias koefisien yang timbul dalam menentukan total pengaruh yang diberikan variabel bebas kepada variabel terikat apabila pengaruhnya tidak signifikan. Pengaruh langsung dan tidak langsung variabel bebas dan totalnya terangkum dalam tabel Analisis Jalur Penelitian berikut:

Tabel 2 : Analisis Jalur Penelitian

Variabel	Koefisien Jalur	Pengaruh			Pengaruh Bersama $R_{y,x2}^2$
		Langsung	Tidak Langsung (melalui Y)	Total	
X1 (Ekonomi)	0.0165	-	0.0727	0.00119	
X2 (Kesehatan)	0.0020	0.0020	-	0.0020	
X3 (Pendidikan)	0.027	-	0.0727	0.00196	
Y (PDRB Perkapita)	0.0727	0.0727	-	0.0727	
Y dan X2	-	-	-	-	0.64

Sumber : Data diolah Penulis, 2018

Pembahasan

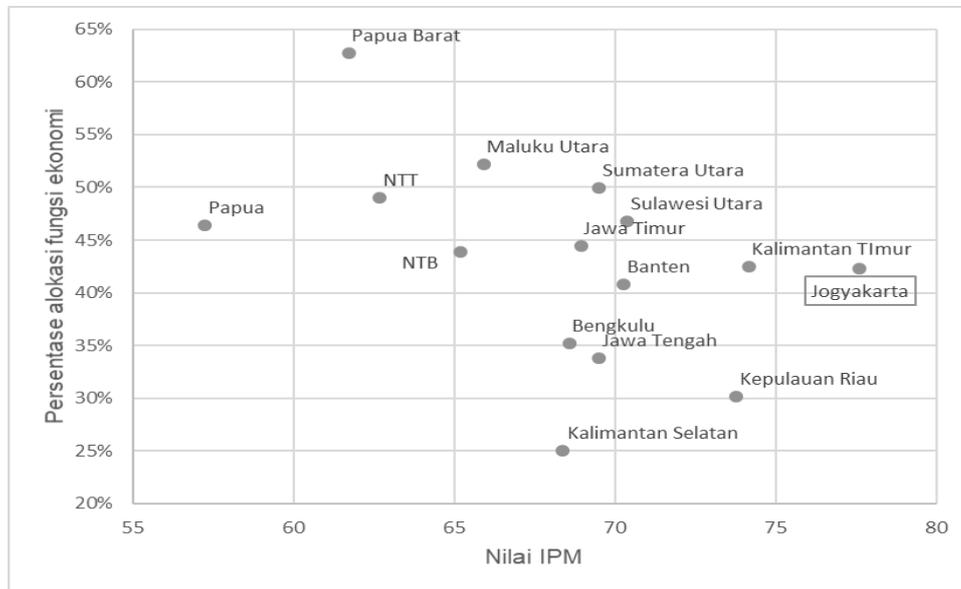
Pengaruh pengeluaran pemerintah fungsi ekonomi

Sesuai dengan rumusan masalah pertama yang membahas bagaimana pengaruh alokasi belanja pemerintah daerah fungsi ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Pendapatan Domestik Regional Bruto perkapita di Indonesia, dapat dijelaskan bahwa alokasi belanja pemerintah daerah fungsi ekonomi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB perkapita tetapi tidak berpengaruh langsung terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini mengindikasikan bahwa program pemerintah dalam fungsi ekonomi mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Belanja ekonomi yang merupakan belanja pemerintah terhadap kegiatan ekonomi seperti perdagangan, UMKM, tenaga kerja, Pertanian, pertambangan, bahan bakar, transportasi dan lain sebagainya sesuai dengan analisis mampu memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kegiatan ekonomi yang dicerminkan dalam Peningkatan PDRB perkapita.

Berdasarkan interpretasi hasil regresi dan analisis jalur, pengeluaran pemerintah fungsi ekonomi mempunyai koefisien pengaruh sebesar 0.0165 terhadap PDRB perkapita artinya setiap kenaikan satu milyar rupiah pengeluaran tersebut akan meningkatkan PDRB perkapita sebesar 0.0165 juta rupiah atau sebesar 16.500 rupiah. Hal ini konsisten dengan Teori Keynes yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah terutama kepada sektor yang produktif mampu memberikan stimulasi

ekonomi kepada daerah sehingga meningkatkan PDRB. Pengeluaran pemerintah yang efektif dan efisien dalam kegiatan ekonomi memberikan dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat dari peningkatan PDRB perkapita.

Gambar 2 : Persentase Alokasi Pengeluaran Pemerintah Fungsi Ekonomi dalam Tiga Fungsi di 15 (Lima Belas) Provinsi Obyek Penelitian pada Tahun 2015



Sumber : Data Diolah DJPK, 2018

Sesuai dengan gambar 2, dapat diketahui bahwa Papua Barat mempunyai proporsi alokasi ekonomi terbesar dibanding provinsi yang lain di tahun 2015 yaitu sekitar 63%. Walaupun demikian, alokasi yang besar terhadap alokasi ini tidak menjamin nilai IPM yang tinggi di provinsi tersebut. Hal ini juga berlaku bagi Provinsi Papua, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur di mana alokasi ekonomi di daerah tersebut lebih dari 45% dibanding dua fungsi lainnya tetapi nilai IPM masih tergolong rendah. Kondisi ini cukup bertolak belakang dengan provinsi dengan IPM tinggi. Provinsi Jogjakarta, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau dan Banten hanya mengalokasikan pengeluaran fungsi ekonomi kurang dari 45% tetapi nilai IPM di Provinsi tersebut cukup tinggi. Hal ini mengindikasikan alokasi yang cukup besar terhadap fungsi ekonomi bukan merupakan desain terbaik dalam membentuk nilai IPM yang tinggi meskipun sesuai analisis alokasi fungsi ini mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

Kemudian untuk menganalisis fungsi ekonomi lebih dalam yaitu melihat pengaruh dalam pertimbangan kategori IPM per provinsi, dapat dilihat dalam hasil analisis variabel *dummy* Persamaan Pertama. Dalam model tersebut, kedua variabel *dummy* yaitu D1 dan D2 tidak berpengaruh secara signifikan sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila pengeluaran pemerintah fungsi ekonomi dianggap konstan atau diabaikan, ketiga kategori provinsi baik itu tinggi, sedang maupun rendah tidak memiliki perbedaan konstanta terhadap PDRB perkapita.

Tabel 3 : Tingkat Signifikansi Variabel *Dummy* dalam Persamaan Pertama

Variabel	Koefisien	t-Statistic	Probabilitas	Keterangan
D1	-14.39036	-0.958245	0.3407	Tidak Signifikan
D2	26.52071	1.766361	0.0809	Tidak Signifikan

Sumber: Hasil Eviews 9, 2018

Pengaruh yang positif dan signifikan pengeluaran pemerintah fungsi ekonomi terhadap PDRB perkapita atau pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Masoome Fouladi (2010) yang berjudul *The Impact of Government Expenditure on GDP, Employment and Private*. Melalui pendekatan yang berbeda, Masoome Fouladi menjelaskan bahwa bahwa peningkatan pengeluaran di sektor-sektor produktif seperti pertambangan, minyak

dan pelayanan umum dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi swasta di Iran meskipun pengeluaran infrastruktur tidak meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Meskipun pengeluaran pemerintah ekonomi berpengaruh terhadap PDRB perkapita tetapi fungsi ini tidak berdampak langsung terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini disebabkan karena pengeluaran ekonomi berfokus kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi sehingga diperlukan adanya variabel perantara untuk menjelaskan pengaruh secara tidak langsung fungsi ini yaitu variabel PDRB perkapita. Sesuai dengan hasil interpretasi analisis jalur, pengaruh tidak langsung dari pengeluaran pemerintah fungsi ekonomi adalah sebesar 0.00119 terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui PDRB perkapita. Hal ini memiliki pengertian bahwa setiap kenaikan satu milyar rupiah pengeluaran tersebut akan meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Manusia sebesar 0.00119 atau setiap kenaikan seribu milyar atau satu triliun rupiah Pengeluaran fungsi ekonomi akan mempengaruhi peningkatan nilai 1.19 Indeks tersebut. Nilai koefisien dari pengeluaran pemerintah fungsi ekonomi ini merupakan yang paling rendah dibanding alokasi dua fungsi yang lain dalam mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia.

PDRB perkapita sebagai variabel perantara tersebut mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi. Nilai koefisien dari PDRB perkapita adalah sebesar 0.0727 terhadap Indeks Pembangunan Manusia artinya setiap kenaikan satu juta rupiah PDRB perkapita akan meningkatkan 0.0727 nilai IPM. Hal ini konsisten dengan beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ilyas et al (2016), Muliza et al (2017), Agustina et al (2016), dan Novita Dewi (2017) yang menyatakan bahwa PDRB atau pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

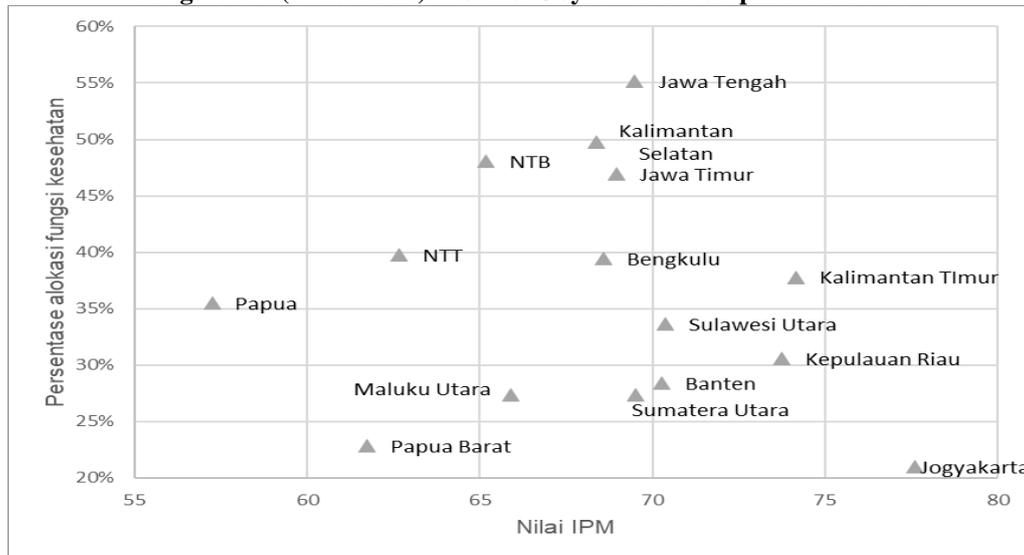
Pengaruh pengeluaran pemerintah fungsi kesehatan

Sesuai dengan rumusan masalah kedua yang membahas bagaimana pengaruh alokasi belanja pemerintah daerah fungsi kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Pendapatan Domestik Regional Bruto perkapita di Indonesia, dapat diketahui bahwa pengeluaran kesehatan tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap PDRB perkapita tetapi langsung berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini mengindikasikan bahwa pengeluaran bidang ini tidak menitikberatkan kepada pertumbuhan ekonomi namun lebih mengutamakan kesehatan masyarakat dan peningkatan kualitas kesehatan di Indonesia yang berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi.

Hal ini diperkuat dari sasaran strategis Pemerintah di bidang kesehatan menurut Kementerian Keuangan. Sasaran strategis Pemerintah yang terangkum dalam Informasi APBN tahun 2017 mengutamakan Imunisasi, Jaminan Kesehatan, prevalensi stunting, Biaya Operasional Kesehatan (BOK) dan keluarga Berencana. Dari berbagai sasaran tersebut, hanya biaya operasional kesehatan yang mempunyai kecenderungan peningkatan terhadap ekonomi lebih tinggi dibanding sasaran yang lain karena menyentuh dimensi ekonomi secara langsung. Sedangkan sasaran yang lain yaitu Imunisasi kepada 92% bayi, Jaminan Kesehatan terhadap 94 juta jiwa, prevalensi stunting sebanyak 29% baduta serta Keluarga Berencana dalam anggaran kesehatan 2017 adalah refleksi upaya preventif Pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan di Indonesia.

Pengeluaran Pemerintah fungsi kesehatan mempunyai koefisien pengaruh total sebesar 0.0020 terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Artinya setiap kenaikan satu milyar pengeluaran fungsi tersebut akan meningkatkan nilai indeks sebesar 0.0020 atau setiap satu triliun rupiah pengeluaran fungsi kesehatan akan mempengaruhi peningkatan nilai 2.0 Indeks Pembangunan Manusia. Apabila dibandingkan dengan koefisien alokasi dua fungsi yang lain, koefisien pengaruh pengeluaran kesehatan mempunyai nilai terbesar. Hal ini mengindikasikan pentingnya pengeluaran fungsi kesehatan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dibanding dua alokasi pengeluaran yang lain.

Gambar 3 : Persentase Alokasi Pengeluaran Pemerintah Fungsi Kesehatan dalam Tiga Fungsi di 15 (Lima Belas) Provinsi Obyek Penelitian pada Tahun 2015



Sumber : Data Diolah DJPK, 2018

Sesuai dengan gambar 3, Provinsi Jawa Tengah mempunyai persentase terbesar dibanding provinsi lainnya dalam pengalokasian fungsi kesehatan di tahun 2015. Provinsi dengan IPM sedang yang lain seperti Jawa Timur, Kalimantan Selatan juga mempunyai proporsi alokasi cukup besar dalam fungsi ini di mana proporsinya lebih dari 45% di tahun 2015.

Persentase terendah justru didapat oleh Provinsi Jogjakarta sebagai daerah dengan IPM tertinggi. Provinsi lain dengan IPM tinggi juga tidak memberikan porsi yang cukup besar bagi pengeluaran fungsi ini seperti Banten, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau dan Kalimantan Timur di mana nilai persentasenya kurang dari 40%. Hal ini mengindikasikan kurang bergantungnya provinsi dengan IPM tinggi terhadap alokasi fungsi kesehatan. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh fondasi kesehatan yang cukup baik di provinsi dengan kategori ini sehingga pemerintah daerah lebih mengalokasikan pengeluaran pemerintah dalam fungsi yang lain. Kemudian kondisi ini juga diperkuat oleh analisis variabel *dummy* dalam Persamaan Kedua di mana provinsi dengan kategori IPM tinggi dan sedang tidak terlalu bergantung dengan fungsi ini dibandingkan dengan provinsi dengan IPM rendah.

Tabel 4 : Tingkat Signifikansi Variabel *Dummy* dalam Persamaan Kedua

Variabel	Koefisien	<i>t-Statistic</i>	Probabilitas	Keterangan
C	58.34121	45.13972	0.0000	Signifikan
D1	5.169708	2.889262	0.0049	Signifikan
D2	8.472268	4.678622	0.0000	Signifikan

Sumber: Hasil Eviews 9, 2018

Sesuai dengan tabel dalam analisis jalur struktur Persamaan Kedua di tabel 4, kedua variabel *dummy* berpengaruh signifikan sehingga memberikan kesimpulan bahwa terdapat perbedaan di antara ketiga kategori apabila pengeluaran kesehatan dianggap konstan atau diabaikan. Provinsi dengan Kategori IPM rendah mempunyai indeks yang jauh lebih rendah dibanding yang lain yaitu 58.34 sedangkan IPM sedang (D1) dan tinggi (D2) masing masing mempunyai nilai IPM 63.51 dan 66.81 apabila pengeluaran kesehatan diabaikan.

Berbagai fakta dan data tersebut mengindikasikan kurang baiknya peningkatan alokasi kesehatan terhadap provinsi dengan IPM rendah padahal sesuai analisis, alokasi kesehatan adalah variabel dengan pengaruh terbesar dalam peningkatan IPM terlebih untuk provinsi dengan IPM kategori rendah. Hasil dari penelitian ini bertentangan dengan beberapa penelitian sebelumnya seperti penelitian yang dilakukan oleh Agustina et al (2016) dan Kahang et al (2016) yang menyatakan bahwa pengeluaran anggaran bidang kesehatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Timur dan Kutai Timur. Muliza et al (2017) dan Laisina et al (2015) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa variabel pengaruh kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di

Provinsi Aceh dan Sulawesi Utara. Walaupun demikian ada beberapa hasil penelitian yang konsisten dengan hasil analisis ini yaitu penelitian dari Ilyas et al (2016), Mohammad Javad Razmi (2011) dan Okafor et al (2017) yang menyatakan bahwa pengeluaran kesehatan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia atau HDI di masing masing obyek penelitian yaitu Kabupaten Sinjai, Iran dan Nigeria.

Pengaruh pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan

Sesuai dengan rumusan masalah ketiga yang membahas bagaimana pengaruh alokasi belanja pemerintah daerah fungsi pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Pendapatan Domestik Regional Bruto perkapita di Indonesia, dapat diketahui bahwa alokasi pengeluaran pendidikan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PDRB perkapita dan Indeks Pembangunan Manusia meskipun pengaruh terhadap IPM tersebut diketahui secara tidak langsung dan melewati variabel perantara.

Berdasarkan analisis regresi dan jalur, pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PDRB perkapita dengan nilai koefisien sebesar 0.027 artinya setiap kenaikan satu milyar rupiah pengeluaran pemerintah fungsi ini akan meningkatkan PDRB perkapita sebesar 0.027 juta rupiah atau 27 ribu rupiah. Nilai koefisien ini lebih tinggi dibanding nilai koefisien fungsi ekonomi sehingga dapat diinterpretasikan bahwa alokasi fungsi ini memberikan pengaruh peningkatan yang lebih tinggi terhadap PDRB perkapita dibanding alokasi fungsi ekonomi.

Pengeluaran Pemerintah fungsi pendidikan mempunyai koefisien pengaruh tidak langsung sebesar 0.00196 terhadap Indeks Pembangunan manusia melalui PDRB perkapita. Nilai koefisien tersebut mempunyai pengertian bahwa setiap kenaikan satu milyar pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan akan meningkatkan nilai indeks sebesar 0.00196 atau setiap kenaikan satu triliun rupiah pengeluaran fungsi pendidikan akan mempengaruhi peningkatan nilai sebesar 1.96 Indeks Pembangunan Manusia.

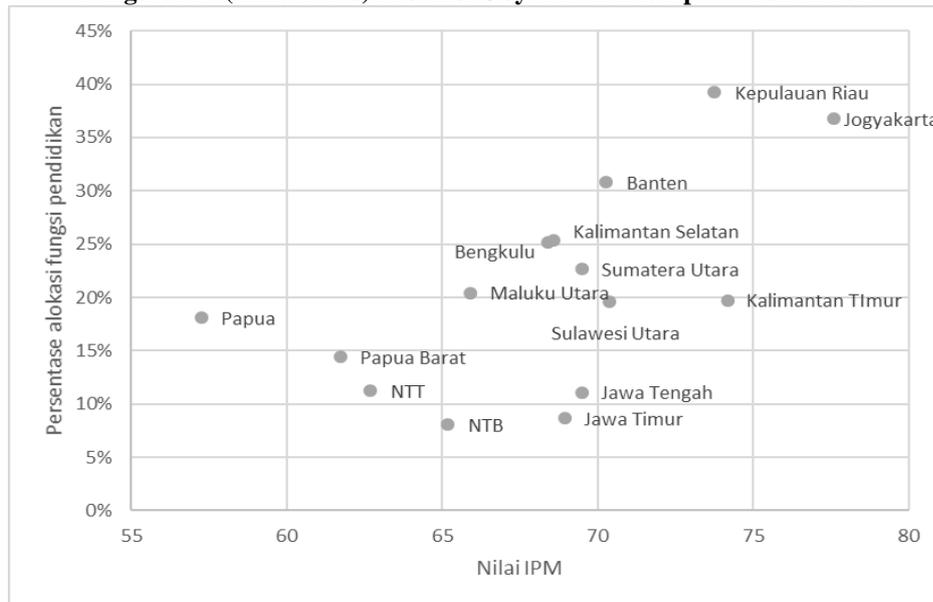
Hal ini juga diperkuat oleh Atmanti (2005) yang menjabarkan peranan ilmu pengetahuan dan investasi modal sumber daya manusia dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pendidikan yang semakin tinggi memperluas pengetahuan dan rasionalitas cara berpikir manusia. Hal ini memberikan kemungkinan yang lebih besar bagi manusia untuk menerima dan memproses informasi dengan lebih cepat dan terstruktur sehingga meningkatkan produksi dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini juga mendukung hipotesis yang diajukan serta menguatkan penelitian yang dilakukan oleh Ilyas et al (2016), Merang Kahang et al (2016) dan Laisina et al (2015) yang menyatakan bahwa pengeluaran untuk pendidikan berdampak positif terhadap indeks pembangunan manusia. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan pendapat Todaro (2006) bahwa pendidikan sebagai komponen pertumbuhan dan pembangunan yang vital dan memiliki kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

Meskipun berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia, tetapi alokasi pengeluaran fungsi pendidikan tidak berpengaruh secara langsung karena harus melalui variabel perantara PDRB perkapita terlebih dahulu untuk melihat pengaruhnya. Nilai koefisien dari pengeluaran fungsi ini lebih tinggi dibanding fungsi ekonomi tetapi lebih rendah dibanding fungsi kesehatan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengeluaran fungsi pendidikan lebih menyentuh kenaikan pertumbuhan ekonomi dibanding pembangunan dalam peningkatan kualitas pendidikan.

Hal ini juga dapat dilihat dari sasaran Pemerintah bidang pendidikan menurut Kementerian Keuangan yang bertujuan memberikan Tunjangan Profesi kepada 1,3 juta guru, suntikan dana kepada siswa melalui Kartu Indonesia Pintar kepada 19,7 juta jiwa, Bantuan Bidik Misi kepada 362 ribu mahasiswa, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada lebih dari 50 juta siswa serta rehabilitasi sekolah di tahun 2017. Kebijakan umum Pemerintah terhadap pendidikan ini tentunya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena bantuan bersifat dana finansial sehingga berdampak langsung terhadap pendapatan perkapita di Indonesia meskipun peningkatan kualitas atau indeks pendidikan menurut analisis belum berdampak secara langsung.

Sesuai hasil evaluasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, ditemukan kurang optimalnya pengelolaan keuangan anggaran daerah salah satunya dari sisi anggaran pendidikan. Jumlah gaji dan tunjangan guru jauh lebih besar dibanding alokasi untuk pembangunan maupun renovasi sekolah yang rusak. Hal ini memperkuat analisis bahwa pengeluaran pendidikan secara langsung berdampak kepada kegiatan ekonomi tetapi tidak mempunyai pengaruh langsung terhadap peningkatan kualitas pendidikan.

Gambar 4 : **Persentase Alokasi Pengeluaran Pemerintah Fungsi Pendidikan dalam Tiga Fungsi di 15 (Lima Belas) Provinsi Obyek Penelitian pada Tahun 2015**



Sumber : Data Diolah DJPK, 2018

Meskipun secara umum proporsi alokasi fungsi pendidikan cukup rendah dibanding dua fungsi lainnya serta alokasinya yang fluktuatif, tetapi fungsi pendidikan sesuai analisis tetap memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Alokasi fungsi ini bahkan lebih menggambarkan keteraturan secara grafik statistik tentang proporsi alokasi dan Indeks Pembangunan Manusia. Umumnya daerah dengan IPM tinggi mempunyai alokasi fungsi pendidikan yang tinggi dan daerah dengan IPM rendah umumnya mempunyai alokasi fungsi yang kecil. Sesuai dengan gambar 4, proporsi alokasi pendidikan yang besar umumnya terdapat dalam provinsi dengan IPM tinggi seperti Kepulauan Riau dan Jogjakarta. Tingginya alokasi di dua provinsi tersebut mengindikasikan kepedulian pemerintah daerah tersebut terhadap pendidikan.

Provinsi dengan IPM sedang mempunyai persentase alokasi yang bervariasi, di mana terdapat tiga provinsi dengan alokasi yang cukup tinggi seperti Kalimantan Selatan, Bengkulu dan Sumatera Utara yang mempunyai alokasi di atas 20%. Sedangkan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur mempunyai proporsi yang kecil yaitu hanya dibawah 15%. Berbeda dengan provinsi dengan IPM tinggi dan sedang, provinsi dengan kategori IPM rendah mempunyai proporsi pendidikan yang kecil. Hampir semua provinsi dengan kategori ini kecuali Maluku Utara, mempunyai persentase kurang dari 20%. Hal ini mengindikasikan kurang perhatiannya Pemerintah Daerah terhadap alokasi fungsi pendidikan dalam kategori provinsi IPM rendah.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah sebagai berikut:

1. Pengeluaran pemerintah fungsi ekonomi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto perkapita dan Indeks Pembangunan Manusia. Hasil ini sesuai dengan hipotesis awal yang dibangun di mana menurut hipotesis diduga bahwa pengeluaran pemerintah sektor ekonomi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan PDRB perkapita. Walaupun demikian, pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia bersifat tidak langsung dan melalui PDRB perkapita terlebih dahulu. Hal ini mengindikasikan bahwa pengeluaran fungsi ekonomi menyentuh pendapatan perkapita dan secara tidak langsung memberikan pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
2. Pengeluaran pemerintah fungsi kesehatan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia tetapi tidak mempunyai pengaruh terhadap PDRB

perkapita. Hasil ini kurang sesuai dengan hipotesis kedua yang dibangun di mana hipotesis tersebut menyatakan bahwa diduga bahwa pengeluaran pemerintah sektor kesehatan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan PDRB perkapita. Hal ini mengindikasikan bahwa alokasi fungsi ini lebih menitikberatkan kepada kualitas peningkatan kesehatan atau pembangunan ekonomi dibanding peningkatan pendapatan individu atau pertumbuhan ekonomi.

3. Pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui dan Domestik Regional Bruto perkapita. Hasil analisis ini konsisten dengan hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa diduga bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan PDRB perkapita. Walaupun demikian, pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia bersifat tidak langsung dan melalui PDRB perkapita terlebih dahulu. Hal ini mengindikasikan bahwa alokasi terhadap fungsi ini mempengaruhi pendapatan individu tetapi tidak berpengaruh langsung terhadap peningkatan kualitas pendidikan sehingga diperlukan desain yang baik dalam menetapkan alokasi yang tepat untuk peningkatan kualitas pendidikan.
4. Meskipun dari ketiga hipotesis yang dibangun terdapat hasil analisis yang kurang sesuai, tetapi semua variabel pengeluaran pemerintah dalam penelitian ini mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan jalur pengaruh yang berbeda. Fungsi ekonomi dan pendidikan berpengaruh tidak langsung melalui PDRB perkapita dan fungsi kesehatan berpengaruh langsung terhadap Indeks Pembangunan Manusia tanpa melalui PDRB perkapita.
5. Pengalokasian pengeluaran pemerintah fungsi kesehatan mempunyai pengaruh tertinggi kemudian diikuti oleh pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan dan yang terakhir adalah pengeluaran fungsi ekonomi dalam mempengaruhi IPM.
6. Provinsi dengan IPM rendah mempunyai ketergantungan yang tinggi terhadap pengeluaran pemerintah fungsi kesehatan dibanding provinsi dengan IPM sedang dan tinggi. Hal ini harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah di provinsi dengan kategori ini.

Saran

Dengan mempertimbangkan kesimpulan yang diambil dan beberapa pembahasan hasil penelitian maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Ketiga fungsi pengeluaran pemerintah dalam penelitian ini memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui jalur analisis yang berbeda. Hal ini mengindikasikan bahwa untuk meningkatkan IPM Indonesia yang masih rendah dibanding negara lain, dibutuhkan peran pemerintah provinsi terutama peningkatan terhadap alokasi pengeluaran pemerintah pada fungsi ekonomi, kesehatan dan pendidikan karena hal ini sesuai analisis mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.
2. Alokasi fungsi ekonomi dapat dipertajam dengan lebih memfokuskan kepada sektor ekonomi yang produktif dan dibutuhkan disetiap karakteristik provinsi yang berbeda sehingga mampu memberikan efek yang lebih baik kepada PDRB perkapita dan Indeks Pembangunan Manusia. Meskipun demikian karena sifatnya yang tidak langsung kepada Indeks Pembangunan Manusia dan koefisien pengaruh yang paling kecil dibanding dua fungsi lain, apabila pemerintah daerah berfokus kepada pembangunan maka pengeluaran pemerintah fungsi ini seharusnya digunakan dengan lebih efisien atau sebagian dapat dialihkan kepada fungsi lain yang berpengaruh secara langsung terhadap pembangunan.
3. Pemerintah daerah dapat mempertimbangkan belanja di sektor kesehatan untuk peningkatan pembangunan dibanding pendapatan perkapita. Alokasi untuk kesehatan juga harus lebih dipertajam untuk peningkatan kualitas kesehatan dan meminimalisir alokasi untuk peningkatan ekonomi karena pengaruhnya tidak signifikan terhadap pendapatan perkapita. Alokasi fungsi kesehatan seperti pemberian imunisasi dasar, perbaikan gizi buruk, jaminan kesehatan dan penyuluhan keluarga berencana harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan sedangkan alokasi kesehatan yang cenderung mempengaruhi ekonomi seperti peningkatan gaji tenaga medis, dan peningkatan biaya operasional kesehatan harus lebih diminimalisir dan ditinjau kembali. Apabila pemerintah daerah berfokus kepada pembangunan maka alokasi di fungsi kesehatan dapat ditingkatkan karena memiliki pengaruh terbesar terhadap IPM dibanding dua fungsi lain.

4. Pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan tidak berpengaruh secara langsung terhadap IPM disebabkan alokasi selama ini memiliki kecenderungan hanya terhadap peningkatan pendapatan perkapita seperti peningkatan gaji guru dan tunjangan guru, dana bantuan sekolah dan beasiswa. Sehingga diperlukan desain ulang alokasi yang tepat terhadap fungsi pendidikan agar tidak hanya memberi pengaruh terhadap pendapatan perkapita tetapi juga memberikan pengaruh secara langsung terhadap pembangunan. Alokasi pendidikan dapat difokuskan terhadap peningkatan kualitas pendidikan seperti rehabilitasi sekolah, peningkatan pelatihan dan pengembangan ilmu serta peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
5. Provinsi dengan IPM kategori rendah seharusnya lebih menitikberatkan pengeluaran pemerintah kepada fungsi kesehatan karena menurut analisis provinsi dengan IPM rendah membutuhkan pengeluaran fungsi kesehatan untuk peningkatan pembangunan. Daerah dengan IPM rendah umumnya masih menganggap kurang pentingnya fungsi ini dengan memberikan alokasi lebih kepada fungsi lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina et all. 2014. Pengaruh pengeluaran pemerintah daerah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Serta Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Timur. *Jurnal Ekonomi Keuangan, dan Manajemen, Volume 12, No. 2, pp. 192-217.*
- Atmanti dan Dwi, Hastarini. (2005). Investasi sumber daya manusia melalui pendidikan. *Jurnal Dinamika Pembangunan, No.1, pp. 30-39.*
- Atmawikarta. 2003. Investasi Kesehatan untuk Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Perencanaan Pembangunan No. 30, pp. 1-14.*
- Badan Pusat Statistik, *Produk Domestik Regional Bruto Menurut Penggunaan Kabupaten Rembang 2011-2016.* Rembang: Badan Pusat Statistik.
- Boediono. 2012. *Teori Pertumbuhan Ekonomi.* Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta.
- Deliarnov. 2007. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi.* RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Dewi, Novita. 2017. Pengaruh kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau. *JOM Fekon, Vol. 4, No. 1, pp. 870-822.*
- Direktorat Penyusun APBN. *Informasi APBN 2017.* Jakarta: Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Anggaran.
- Ekananda, Mahyus. 2016. *Analisis Ekonometrika Data Panel.* Edisi 2. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Fouladi, Masoome. 2010. The Impact of Government Expenditure on GDP, employment and private investment a CGE model approach. *Iranian Economic Review, Vol.15, No.27, pp. 55-75.*
- Gujarati, Damodar S. 2007. *Ekonometrika.* Jakarta: Erlangga.
- Ilyas et al. 2014. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan Terhadap IPM dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sinjai. Universitas Hasanuddin, Makassar.

- Kahang et al. 2016. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, Volume 18, No. 2, pp. 130-140.
- Landau, Daniel. 1997. *Government Expenditure, Human Capital Creation and Economic Growth. J. Of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, Vol. 9 No.3, pp. 467-487.
- Laisina et al. 2015. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan Terhadap PDRB Melalui Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara Tahun 2002-20013. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 15, No. 04, pp. 193-208.
- Mulia et al. 2017. Analisis pengaruh belanja pendidikan, belanja kesehatan, tingkat kemiskinan dan PDRB terhadap IPM di Provinsi Aceh. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* Vol. 3, No.1, pp. 51-69.
- Nugroho, Yanuar. 2018. *Tantangan Kesehatan Papua: Alam, Manusia, dan Tatakelola*. Kantor Staf Presiden. Jakarta. (<http://www.ksp.go.id/tantangan-kesehatan-papua-alam-manusia-dan-tatakelola>) diakses tanggal 3 Maret 2018.
- Okafor et al. 2017. Effect of Government Expenditure on Human Capital Development in Nigeria. *IARD International Journal of Banking and Finance Research*, ISSN 2406-8634 Vol. 3, No.2, pp. 1-14.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran.*
- Prasetyo et al. 2013. The Government Expenditure Efficiency towards the Human Development. *Procedia Economics and Finance* No.5, pp. 615 – 622.
- Razmi, M. Javad. 2012. Investigating the Effect of Government Health Expenditure on HDI in Iran. *Scientific Papers Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology*, Vol.2, No. 5, pp. 1-13.
- Riduwan, Engkos, Achmad Kuncoro. *Cara Menggunakan dan Memaknai Path Analysis*, Alfabeta: Bandung, 2017.
- Sabir et al. Local government expenditure, economic growth and income inequality in South Sulawesi province. 2015. *Journal of Applied Economics and Business*, Vol. 3, No. 2, pp 61-73.
- Simorangkir, Eduardo. 2017. *Dana Pendidikan Lebih Banyak untuk Gaji Ketimbang Bangun Sekolah*. (<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3738100>) diakses pada tanggal 17 Maret 2018.
- Skousen, Mark. *Sang Maestro*, Prenadamedia Gorup. Jakarta: 2005.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supomo, Bambang dan Indriantoro, Nur. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta : Penerbit BFEE UGM.
- Todaro, Michael P. dan Smith, Stephen. 2012. *Economic Development 11th Ed*. Pearson Higher Ed. USA.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi khusus.*